Notulensi Policy Talks

"Menuju 2030: Strategi Akselerasi Capaian SDGs Untuk Indonesia Emas 2045"

Tempat	Zoom Meeting
Hari / Tanggal	Senin, 17 Maret 2025
Waktu	14.00-15.00
Narasumber	1. Dr. Sanjoyo, MEc (Manajer Pilar Pembangunan Sosial Sekretariat Nasional SDGs Bappenas) 2. Made Natasya Restu Dewi Pratiwi (Peneliti Bidang Sosial, The Indonesian Institute)
Penyelenggara	The Indonesian Institute
Peserta	*Online*

Ringkasan

Pada gari Senin, 17 Maret 2025, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) mengadakan diskusi PolicyTalks dengan judul dan narasumber seperti terlampir pada laporan. Di awal, Bapak Sanjoyo memaparkan tentang progres pencapaian *Sustainable Development Goa*ls (SDGs) di tingkat global masih menghadapi tantangan besar. Berdasarkan data dari The Sustainable Development Goals Report 2024, hanya 17% target yang saat ini berada pada jalur yang tepat untuk tercapai. Sebanyak 30% target mengalami stagnasi, sementara 53% lainnya mengalami kemunduran. Situasi ini menggambarkan bahwa dunia masih memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk mencapai target SDGs pada 2030, terutama di kawasan Asia Pasifik. Laporan Asia and the Pacific SDG Progress Report 2024 menunjukkan bahwa pencapaian SDGs di wilayah ini diperkirakan akan tertunda hingga 32 tahun jika tidak ada upaya transformatif yang dilakukan.

Di Indonesia menurutnya, capaian SDGs menunjukkan hasil yang lebih baik meskipun masih menghadapi tantangan. Berdasarkan laporan SDGs Bappenas per November 2024, dari 233 indikator yang diukur, sekitar 61,4% atau 143 indikator telah mencapai target atau menunjukkan kemajuan yang signifikan. Meski demikian, masih terdapat 28 indikator yang mengalami stagnasi dan 62 indikator lainnya mengalami regresi atau kemunduran.

Jika dilihat berdasarkan pilar-pilar SDGs, capaian Indonesia bervariasi. Pilar sosial menunjukkan progres yang cukup baik dengan 58% indikator dalam kategori tercapai atau mengalami kemajuan signifikan, sementara pilar ekonomi sedikit lebih baik dengan 61% indikator yang berada dalam jalur yang positif. Tantangan terbesar tampak pada pilar lingkungan, di mana hanya 50% indikator yang mengalami perkembangan positif, sementara selebihnya mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran. Di sisi lain, pilar hukum dan tata kelola menunjukkan hasil yang cukup baik dengan 67% indikator berada dalam kategori tercapai atau mengalami kemajuan signifikan, meskipun masih ada sejumlah tantangan dalam indikator tertentu.

Untuk memastikan bahwa SDGs tetap menjadi bagian utama dalam perencanaan pembangunan nasional, pemerintah telah mengintegrasikan target-target SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Sejak 2017, Indonesia telah melakukan berbagai pemutakhiran terhadap indikator SDGs. Metadata SDGs 2017 mencakup 17 tujuan, 169 target, dan 319 indikator, kemudian diperbarui pada 2020 menjadi 17 tujuan, 160 target, dan 289 indikator, serta kembali diperbaharui pada 2024 dengan 17 tujuan, 160 target, dan 300 indikator. Dalam RPJMN 2015-2019, SDGs telah diterjemahkan ke dalam 96 target dan 159 indikator, sementara pada periode RPJMN 2020-2024, cakupan SDGs diperluas menjadi 124 target dan 188 indikator. Kini, dalam RPJMN 2025-2029, semakin banyak indikator yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan nasional. Hingga saat ini, 141 indikator telah masuk dalam RPJMN 2025-2029, sementara 125 indikator masih dalam proses finalisasi untuk diusulkan dalam dokumen akhir.

Pemerintah juga telah menerbitkan berbagai regulasi untuk memperkuat implementasi SDGs. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian SDGs menjadi regulasi awal yang mengatur implementasi SDGs di Indonesia dengan lampiran 96 target dan 159 indikator. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 memperbarui regulasi sebelumnya dengan lampiran 124 target dan 199 indikator. Kedua regulasi ini menjadi dasar dalam integrasi SDGs ke dalam kebijakan pembangunan nasional.

Selain RPJMN, integrasi SDGs juga akan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang akan menjadi panduan utama dalam memastikan pembangunan Indonesia tetap sejalan dengan prinsip-prinsip SDGs hingga tahun 2045.

Di samping itu, Rencana Aksi Nasional SDGs 2025-2029 yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas akan menetapkan strategi konkret dalam pencapaian indikator SDGs di berbagai sektor.

Dengan berbagai kebijakan ini, Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam pencapaian SDGs, baik di tingkat kebijakan maupun implementasi. Meskipun progres yang dicapai cukup signifikan, masih terdapat tantangan yang harus diatasi, terutama dalam indikator yang mengalami stagnasi atau regresi. Integrasi SDGs ke dalam RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045 diharapkan dapat mempercepat pencapaian target-target pembangunan berkelanjutan, dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat, inklusivitas, dan kelestarian lingkungan. Upaya ini menjadi kunci dalam memastikan Indonesia dapat mencapai visi pembangunan yang berkelanjutan hingga tahun 2045.

Pak Sanjoyo menjawab pertanyaan tentang bagaimana implementasi SDGs di Indonesia telah dimasukkan dalam RPJMN, meskipun dengan pemilihan indikator yang disesuaikan dengan prioritas nasional. Sanjoyo menegaskan bahwa dari 247 indikator global yang diadopsi, hanya sebagian yang dimasukkan ke dalam RPJMN karena faktor prioritas pembangunan. Integrasi ke dalam RPJMN dan RPJMD memungkinkan adanya alokasi dana serta intervensi proyek yang mendukung pencapaian SDGs.

Tantangan utama dalam implementasi SDGs di Indonesia berkaitan dengan ketersediaan data, kebutuhan nasional dan wilayah, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam supervisi pelaksanaan SDGs, dengan Kemendagri yang menyinkronisasikan indikator nasional dan daerah. Saat ini, dari 289 indikator nasional, hanya 117 yang diterapkan di daerah, dengan dorongan agar data-data tambahan dikumpulkan oleh OPD.

Dari segi pendanaan (ini juga pertanyaan dari salah satu peserta), Indonesia telah mengembangkan mekanisme inovatif untuk mengatasi hambatan finansial, termasuk memobilisasi sumber daya dari sektor non-pemerintah seperti filantropi. Namun, kondisi global juga memengaruhi pencapaian SDGs, misalnya dampak dari kebijakan AS terhadap WHO dan efisiensi USAID yang berdampak pada berbagai proyek di Indonesia.

Sanjoyo juga menyoroti bahwa di kawasan Asia Pasifik, pencapaian penuh SDGs diperkirakan akan tertunda hingga 32 tahun. Beberapa target yang sulit dicapai termasuk penanggulangan TB dan penyakit tidak menular seperti jantung, sementara target pengurangan kemiskinan lebih mungkin tercapai. Faktor ekonomi global juga memengaruhi pencapaian SDGs, terutama terkait dengan fluktuasi harga pangan dan konsumsi.

Dari perspektif tata kelola, good governance dan pemberantasan korupsi masih menjadi tantangan utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pencapaian SDGs. Evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan progres yang berkelanjutan. Partisipasi berbagai kelompok dalam implementasi SDGs juga menjadi perhatian. Pelibatan pemda, pemuda, masyarakat disabilitas, dan kelompok rentan dalam proses SDGs semakin diperkuat, termasuk melalui inisiatif seperti SDGs Festival yang membahas isu-isu spesifik. Komitmen pemda menjadi faktor kunci dalam memastikan partisipasi aktif dari berbagai kelompok masyarakat.

Sebagai penutup, Sanjoyo menekankan pentingnya kolaborasi untuk mencapai SDGs secara efektif, sementara Natasya menyoroti perlunya akselerasi dan perhatian terhadap indikator-indikator yang masih tertinggal.